



PENGADILAN AGAMA BATURAJA

WILAYAH HUKUM KAB. OKU, OKU TIMUR, OKU SELATAN

JALAN JENDERAL A. YANI KM.7 KEMELAK

Telp. (0735) 3321996 Fax. (0735) 320154

BATURAJA 321111

WEBSITE : www.pa-baturaja.net Email : pa_baturaja@yahoo.com

Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah direncanakan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan acuan dalam menyusun langkah-langkah untuk tahun berikutnya.

Berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirilah Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2012 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2012 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan financial badan peradilan sebagaimana dimaksud Ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”.

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirilah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirilah Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga pemerintah Pengadilan Agama Baturaja Kelas IB merupakan pengadilan tingkat pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dalam hal ini juga bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan

menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk menjelaskan capaian kinerja Pengadilan Agama Baturaja Kelas IB dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 3 menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, atas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi dan perbaikan kinerja aparaturnegara / pemerintah.

Dengan mewujudkan manajemen perencanaan di lingkungan Mahkamah Agung yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari pengadilan tingkat pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing. Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2015 Pengadilan Agama Baturaja Kelas IB merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun yang disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 516- 1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 November 2015.